

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah mempengaruhi belanja modal pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Periode pengamatan pada penelitian ini 3 tahun, yaitu tahun 2014-2016. Data penelitian ini diperoleh dari realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berupa pendapatan dan pengeluaran daerah yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data yang diperoleh diunduh langsung melalui situs Dirjen Perimbangan Keuangan (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>) yang sudah menyediakan data yang diperuntukkan kepada publik. Untuk data luas wilayah, diambil dari situs pemerintah daerah masing masing yaitu untuk wilayah Provinsi Papua Barat (<http://www.papubaratprov.go.id>) dan Provinsi Papua (<http://www.papua.go.id>)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada pemerintah kabupaten/kota serta tujuan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan, di antaranya :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diukur berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi belanja modal pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini disebabkan nominal Pendapatan Asli Daerah di kedua provinsi tersebut yang kecil bisa disebabkan kurangnya menggali sumber-sumber potensial yang bisa dimanfaatkan untuk

meningkatkan penerimaan yang sudah ada. Dengan sumber pendapatan internal yang rendah, maka Kota dan Kabupaten yang ada di kedua provinsi ini lebih menggunakan sumber penerimaan eksternal untuk mendanai anggaran dalam belanja modal.

2. Dana Otonomi Khusus (DOK) yang diukur berdasarkan realisasi Dana Otonomi Khusus mempengaruhi belanja modal pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini disebabkan Dana Otonomi Khusus yang nominalnya lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah sehingga daerah-daerah di kedua provinsi ini lebih memilih Dana Khusus dari pemerintah pusat tersebut untuk mendanai anggaran yang diperuntukkan dalam belanja modal.
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang diukur berdasarkan realisasi Sisa Lebih pembiayaan Anggaran mempengaruhi belanja modal pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Diketahui bahwa, setiap kenaikan SiLPA di hampir semua Kota dan Kabupaten di Kedua provinsi ini naik, maka belanja modal juga mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya. Hal ini disebabkan proyek pembangunan yang membutuhkan waktu yang lama terkadang belum selesai dan melewati tahun anggaran sehingga alokasi belanja modal yang belum terealisasi akan meningkatkan terjadinya varian belanja modal dan menjadi SiLPA di tahun berikutnya.
4. Luas Wilayah (LW) yang diukur luas wilayah masing masing Kabupaten dan kota tidak mempengaruhi belanja modal pemerintah Kabupaten dan Kota di

Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini disebabkan tidak terjadinya pemerataan pembangunan . Walaupun Provinsi Papua adalah provinsi terbesar di Indonesia tidak menjadikan belanja modal daerahnya juga ikut besar.

5.2 Implikasi

Hasil temuan dalam penelitian ini membuktikan bahwa Dana Otonomi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah tidak memiliki pengaruh, namun memberi pengaruh positif terhadap belanja modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hasil dari penelitian ini memberikan implikasi yaitu :

1. Presentase alokasi belanja modal yang lebih banyak menggunakan dana perimbangan menjadi perhatian untuk mewujudkan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya untuk alokasi belanja modal, dalam jangka panjang sebaiknya pemerintah Kabupaten dan Kota di pemerintahan daerah perlu mengurangi ketergantungan atas transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat.
2. Kegiatan ekonomi di pedesaan dan diperkotaan harus ditingkatkan sekaligus terintegrasi. Semakin mudah kegiatan ekonomi antara desa dan kota, maka laju pertumbuhan ekonomi juga akan semakin membaik. Dengan itu tercipta iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif akan membuat pemerintah daerah mendapatkan sumber penerimaan baru dari pajak yang

semakin besar sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat.

3. Pemerataan pembangunan yang kurang dicapai dikarenakan luasnya wilayah serta beragam topografi yang harus dihadapi pemerintah setempat untuk melaksanakan pembangunan yang diharapkan untuk menyejahterakan rakyat. Diharapkan pemerintah daerah setempat mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis yang selama ini masih belum berkembang secara optimal.
4. Memberikan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal Pemerintah daerah.

5.3 Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih baik dan lebih kompleks lagi di masa mendatang dengan adanya beberapa saran, seperti:

1. Nilai Koefisien Determinasi yang berada pada angka yang rendah sehingga masih belum menggambarkan secara jelas faktor apa saja yang dapat mempengaruhi belanja modal pemerintah Kabupaten dan kota Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam penelitian ini, hampir semua variable yang diteliti berhubungan langsung dengan anggaran sehingga, penelitian berikutnya perlu menguji faktor-faktor lain yang bisa memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap belanja modal pemerintah seperti dengan menambah variabel independen yang lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan daerah

lainnya maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemandirian keuangan daerah, produk domestik regional bruto, Indeks Pembangunan Manusia bahkan jumlah penduduk, dll.

2. Pada Penelitian ini hanya meneliti selama 3 tahun. Untuk penelitian selanjutnya adalah dengan menambah rentang waktu penelitian sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisir. Kemudian sebaiknya lingkup penelitian diperbesar. Penelitian tidak hanya pada lingkup Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat saja sebagai sampel, tetapi juga pada lingkup pemerintahan atau instansi lainnya. Selain itu, penelitian selanjutnya juga bisa menggunakan metode analisis lain, Seperti path analisis atau kuesioner.